



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



Sosialisasi Laporan EITI Indonesia 2012 - 2013

Sekretariat EITI Indonesia

Hotel Grand Inna, Denpasar
25 Agustus 2016

Outline Presentasi

1. Pentingnya Laporan EITI 2012-2013
2. Cakupan Pelaporan
3. Tantangan yang dihadapi
4. Data dan Infomasi yang Belum dapat disajikan
5. Laporan Kontekstual
6. Laporan Rekonsiliasi
7. Rekomendasi

Entitas Pelapor

9 instansi pemerintah

72 operator Migas

102 non operator Migas

108 perusahaan Minerba

3 Alasan Laporan ini Penting

1. Proses penyusunan yang intens dan melibatkan multipihak (Pemerintah, Industri, CSO)

Sejak disahkannya Ruang Lingkup (Scoping Study) pada tanggal 20 April 2015, terhitung tidak kurang dari 8 kali rapat multipihak dilaksanakan (5 kali rapat tim pelaksana dan 3 kali rapat tim teknis), disamping itu diselenggarakan pula kegiatan pendukung seperti FGD dan sosialisasi yang terkait. Kerja keras yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan ini sangat perlu diapresiasi mengingat beragamnya latar belakang dari anggota tim pelaksana yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah, Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil. Tidak lupa juga partisipasi aktif dari perusahaan pelapor yang membuat laporan ini dapat selesai dengan tepat waktu.

3 Alasan Laporan ini Penting

2. Kaya akan informasi, tidak sekedar rekonsiliasi melainkan mencakup informasi kontekstual

Laporan ini merupakan laporan EITI Indonesia pertama yang disusun menggunakan Standard EITI 2013. Berbeda dengan dua laporan yang telah dipublikasi sebelumnya, Laporan EITI Indonesia 2012-2013 ini mengadopsi Standard EITI 2013. Berarti laporan ini akan menjadi lebih kaya informasi, tidak hanya mencakup informasi rekonsiliasi saja melainkan juga mencakup informasi kontekstual seperti rezim fiskal, kontribusi terhadap ekonomi, data produksi, partisipasi BUMN, dsb.

3 Alasan Laporan ini Penting

3. Menjadi penentu status Indonesia di EITI Internasional

Status “*compliant country*” Indonesia di “*suspend*” oleh Dewan EITI pada awal 2015 yang lalu karena Indonesia dianggap gagal memenuhi persyaratan publikasi laporan “Year-2” yaitu tidak dapat menerbitkan laporan tahun 2012 pada tahun 2014. Dengan terbitnya laporan ini yang mencakup 2 tahun kalender maka status *suspension* Indonesia telah dicabut dan Indonesia kembali menyandang status “*compliant country*”

Perkembangan EITI Indonesia



Kriteria Proses dan Substansi Laporan Berdasarkan Standar EITI ⁽¹⁾

- Tim Pelaksana harus menyetujui terlebih dahulu prosedur dan tanggung jawab yang dilakukan oleh IA dalam penyediaan laporan kontekstual (No.3.1).
- Informasi dalam laporan kontekstual harus mencakup penjelasan mengenai kerangka Hukum dan ketentuan fiskal industri ekstraktif di Indonesia (No.3.2),
- Harus dicantumkan tinjauan umum (*overview mengenai industri ekstraktif di Indonesia*) (No.3.3),
- Kontribusi Industri ekstraktif terhadap perekonomian di Indonesia (No.3.4),



Kriteria Proses dan Substansi Laporan Berdasarkan Standar EITI ⁽²⁾

- Mencakup data-data produksi yang terkait (No.3.5),
- Peran serta pemerintah (dan BUMN) dalam pengembangan industri ekstraktif di Indonesia (No.3.6),
- Alokasi hasil pendapatan dari industri ekstraktif dan kelangsungan hasil pendapatan tersebut (No.3.7 dan 3.8),
- Alokasi dan registrasi dari lisensi industri ekstraktif (No.3.9 dan 3.10),
- Peraturan yang terkait dan transparansi daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari aset industri ekstraktif (No.3.11),
- Pengungkapan daftar mengenai kontrak/izin eksploitasi minyak, gas, mineral dan batubara (No.3.12).

Cakupan Laporan Kontekstual

1. Latar Belakang EITI dan kerangka hukum transparansi informasi publik dalam kaitan implementasi EITI di Indonesia
2. Tata kelola dan ketentuan hukum industri ekstraktif → tugas dan fungsi instansi pemerintah, sistem lisensi, reformasi perbaikan tata kelola yang sedang berjalan
3. Proses alokasi dan tender wilayah migas dan minerba
4. Manajemen Penerimaan Negara → jenis-jenis penerimaan yang berasal dari pajak dan PNB
5. CSR
6. Kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia
7. Peran BUMN



Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan EITI Antara Lain:

- Kesadaran parapihak (*awareness*) akan pentingnya EITI bagi perbaikan tatakelola industri ekstraktif masih rendah → meningkatkan kualitas proses penyusunan laporan (Ratimlak, transparansi data/informasi, himbauan kpd perusahaan, keterlibatan pemda, dll)
- Beberapa peraturan per-UU-an dan *common practice* di Indonesia masih ada yang belum sejalan dengan Standard EITI → revisi atau ??,
- Tidak ada *reward and punishment* bagi perusahaan yang diwajibkan menyampaikan laporan → mengaitkan laporan EITI dgn mekanisme monitoring laporan instansi pemerintah
- Tindak lanjut dari laporan EITI → perbaikan peraturan/regulasi, pencegahan korupsi, optimalisasi penerimaan industri ekstraktif



Laporan Kontekstual

Bagian I: Latar Belakang dan Dasar Hukum Pelaksanaan EITI

Manfaat pelaksanaan EITI:

- Pemerintah → Peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola industri ekstraktif
- Industri → Memperoleh kejelasan dan kepercayaan dari masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan dalam mentaati peraturan
- Masyarakat → Mendapat informasi yang dapat dipercaya sehingga dapat melakukan pengawasan dan analisis lebih lanjut

Dasar Hukum Pelaksanaan EITI:

- Perpres 26/2010 tentang transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif
- Pembentukan Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Bagian II: Tata Kelola Industri Ekstraktif

Membahas:

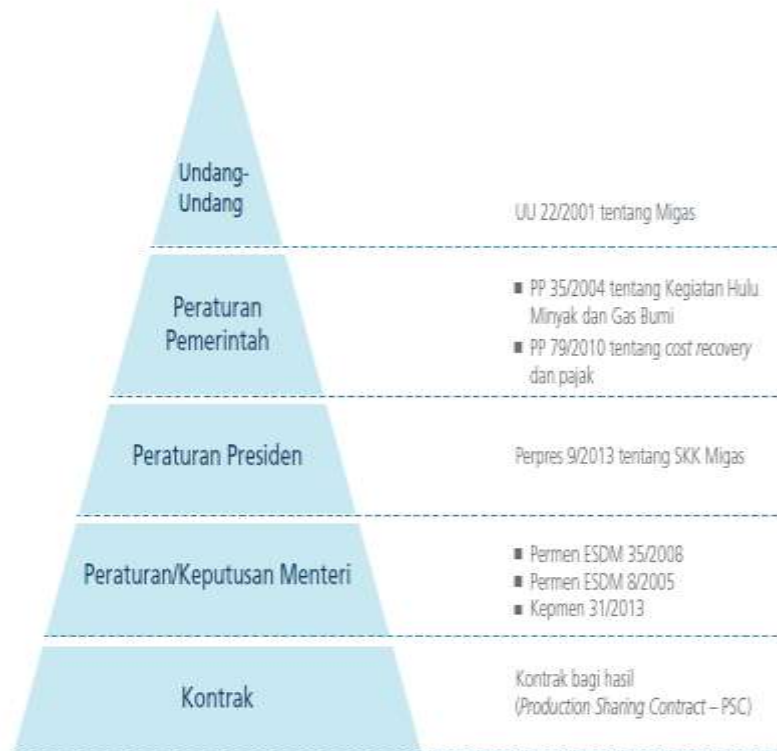
- **Ketentuan hukum industri ekstraktif**
- **Tugas dan fungsi instansi pemerintah**
- **Sistem kontrak dan perizinan industri ekstraktif**
- **Perubahan dan perbaikan tata kelola yang sedang berjalan**

Membahas tentang isu :

- UU 22/2001 tentang Migas
- UU 4/2009 tentang pertambangan Minerba
- UU 23/2009 tentang Pemerintahan daerah
- KemenESDM, Kemenkeu, KemenLHK, Pemda
- PSC, IUP, IPR, IUPK
- Revisi UU Migas
- Pengembangan MOMI (Minerba One Map Indonesia)
- Sertifikasi CnC (Clear and Clean), Korsup KPK
- Modul Penerimaan Negara (MPN)
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

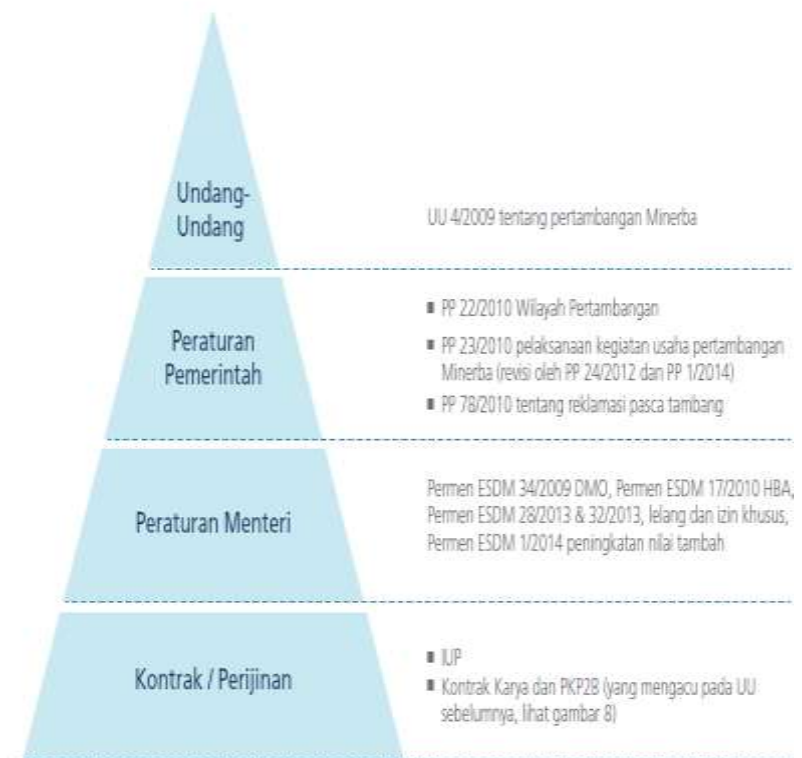
Hirarki Kerangka Hukum Pertambangan Migas dan Minerba

Migas



Sumber: Hasil Olahan

Minerba



Sumber: Hasil Olahan

Bagian IV Manajemen Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

- Penerimaan negara dan kebijakan fiskal yang berasal dari industri ekstraktif
- Proses perencanaan, penganggaran dan audit
- Pandangan umum industri ekstraktif
- Alokasi penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari industri ekstraktif kepada pemda dalam rangka bagi hasil (DBH)

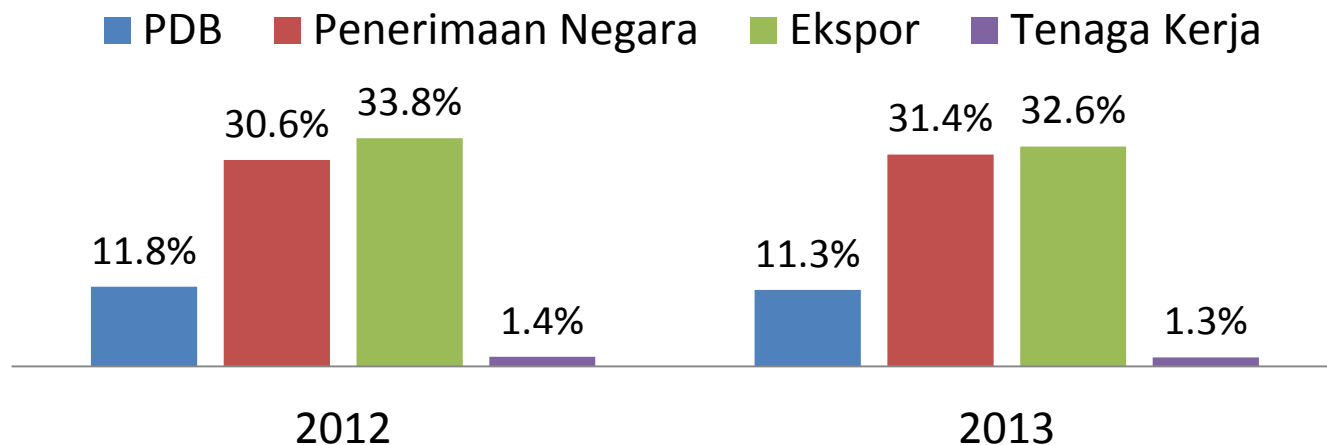
Bagian V Tanggung Jawab LH dan Tanggung Jawab Sosial

- Pertambangan migas: *abandonment and site restoration fund* (ASR Fund)
- Pertambangan minerba: jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang
- Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)

Bagian VI Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia

- Industri ekstraktif di Indonesia dalam konteks global
- Industri migas (potensi, cadangan, produksi, kegiatan eksplorasi yg signifikan)
- Industri pertambangan mineral
- Kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian
- Kegiatan informal dalam industri ekstraktif

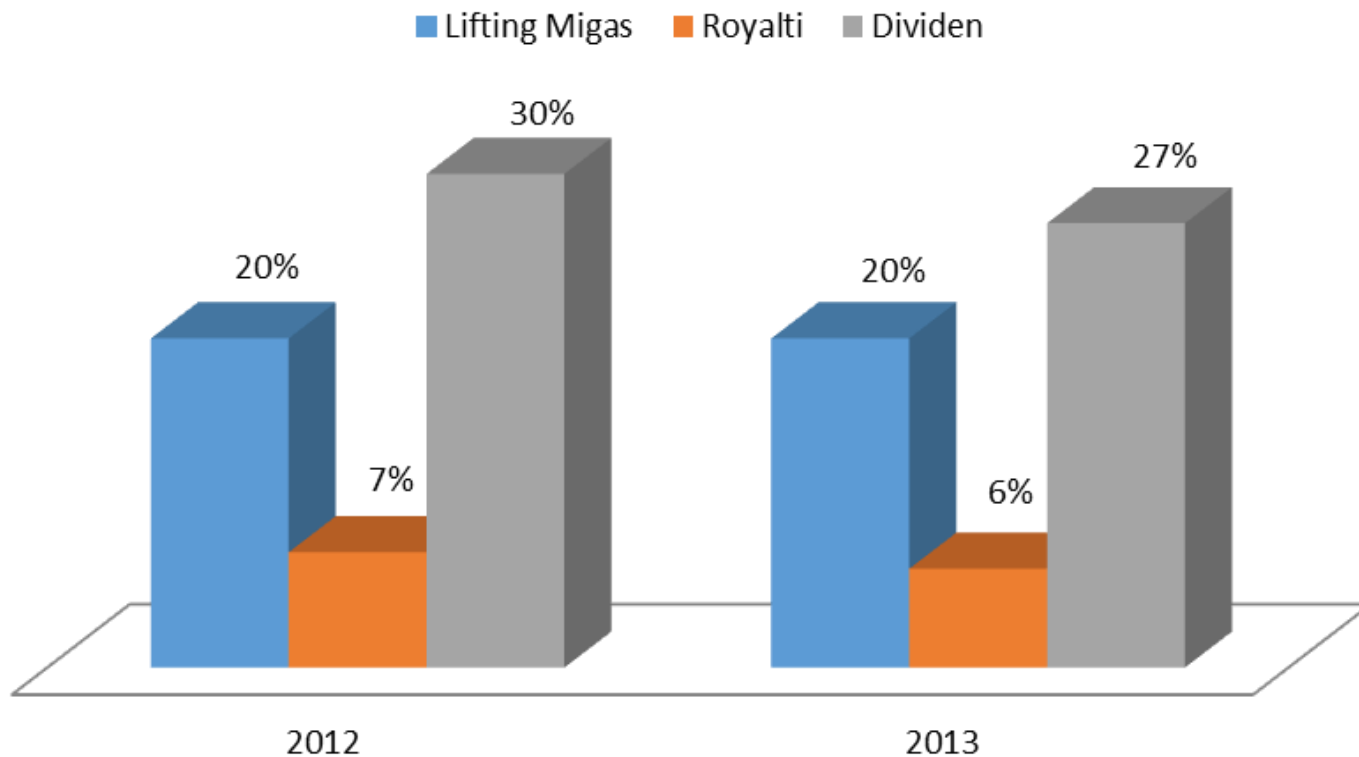
Kontribusi Industri Ekstraktif



Bagian VII: BUMN

- Hubungan BUMN dan Pemerintah
- PT. Pertamina (Persero)
- PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk
- PT. Bukit Asam (Persero) Tbk
- PT. Timah (Persero) Tbk

Peran BUMN dalam skala nasional



BUMN membayar dividen IDR 9,2 Triliun di tahun 2012 dan 9,3 Triliun di tahun 2013

Data Yang Belum Dapat Diakses Publik

- Informasi tentang Koordinat wilayah kerja masih terbatas (bisa diakses tapi berbayar)
- Informasi peserta tender migas
- Informasi *Beneficial Ownership*
- Isi dari Kontrak
- Informasi kadaster (pemilik lisensi, koordinat wilayah pertambangan, tanggal aplikasi, tanggal izin/kontrak, durasi kontrak, jenis komoditas yang diproduksi)

Laporan Rekonsiliasi



Perusahaan
Memperlihatkan
dan membuktikan
pembayaran



Laporan EITI
Menunjukkan dimana
pembayaran pajak dan
royalti diverifikasi dan
direkonsiliasi secara
independen



Pemerintah
Memperlihatkan dan
membuktikan
penerimaan pajak
dan non pajak

Entitas Pelapor

9 instansi pemerintah

72 operator Migas

102 non operator Migas

108 perusahaan Minerba

Perusahaan Migas Non Operator Yang Tidak Melapor di Laporan EITI 2012-2013

Migas	Blok	Status
1. EMP ONWJ Ltd.	Offshore North West Java (ONWJ)	Tidak dapat dihubungi
2. Risco Energy ONWJ / Salamander	Offshore North West Java (ONWJ)	Telah diakuisisi oleh KUFPEC
3. Hess	Natuna Sea Block A	Telah diakuisisi oleh PHE
4. PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait	Tidak dapat dihubungi
5. PT Surya Kencana Perkasa	Tonga	Tidak dapat dihubungi
6. PT Petross Petroleum Production	Tonga	Tidak dapat dihubungi
7. Gulf Petroleum Investment Co.	Seram Non Bula	Tidak dapat dihubungi
8. Lion International Investment Ltd.	Seram Non Bula	Tidak dapat dihubungi
9. Fuel X Tungkal	Tungkal	Tidak dapat dihubungi
10. Orchard Energy Sumatra BV / Risco Energy SES	South East Sumatra	Telah diakuisisi oleh KUFPEC

Presentase kontribusi terhadap penerimaan negara : **1,10%** (2012) dan **0,37%** (2013)
berdasarkan data DJA dit PNBP

Perusahaan Minerba Yang Tidak Melapor di Laporan EITI 2012-2013

No	Kontrak	Perusahaan	Wilayah	Status
1	PKP2B	RIAU BARAHARUM	Riau	Tidak Lapor
2	PKP2B	SUMBER KURNIA BUANA	Kalimantan Selatan	Tidak Lapor
3	KK-Mineral	SEBUKU IRON LATERITIC ORES	Kalimantan Selatan	Tidak Lapor
4	IUP-Batubara	BARA ALAM UTAMA	Kalimantan Timur	Tidak Lapor
5	IUP-Batubara	BHUMI RANTAU ENERGI	Kalimantan Selatan	Enggan Lapor
6	IUP-Batubara	ENERGI BATUBARA LESTARI	Kalimantan Tengah	Tidak Lapor
7	IUP-Batubara	GEMA RAHMI PERSADA	Kalimantan Timur	Tidak Lapor
8	IUP-Batubara	KARYA GEMILANG LIMPAH REJEKI	Kalimantan Tengah	Tidak Lapor
9	IUP-Batubara	KAYAN PUTRA UTAMA COAL	Kalimantan Timur	Tidak Lapor
10	IUP-Batubara	PADANG ANUGERAH	Kalimantan Timur	Tidak Lapor
11	IUP-Batubara	TUNAS MUDA JAYA	Kalimantan Timur	Tidak Lapor
12	IUP-Batubara	UNIT DESA GAJAH MADA	Kalimantan Selatan	Tidak Lapor
13	IUP-Mineral	BUKIT MERAH INDAH	Riau	Tidak Lapor
14	IUP-Mineral	CITRA SILIKA MALLAWA	Sulawesi Tenggara	Tidak Lapor
15	IUP-Mineral	FAJAR MENTAYA ABADI	Kalimantan Tengah	Tutup
16	IUP-Mineral	GUNUNG SION	Kepulauan Riau	Tidak Lapor
17	IUP-Mineral	SERUMPUN SEBALAI	Bangka Belitung	Tidak Lapor
18	IUP-Mineral	STARGATE PASIFIC RESOURCES	Sulawesi Tenggara	Tidak Lapor
19	IUP-Mineral	TELAGA BINTAN JAYA	Kepulauan Riau	Tidak Lapor
20	IUP-Mineral	TININDO INTER NUSA	Bangka Belitung	Tidak Lapor
21	IUP-Mineral	TUJUH SW	Bangka Belitung	Tutup

Presentase kontribusi terhadap penerimaan negara : **2,52%** (2012) dan **3,03%** (2013)
berdasarkan data DJA dit PNBP

Penerimaan Negara dari Sektor Migas

Penerimaan Negara Tahun 2012 dan 2013 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2012 (dalam Triliun Rupiah)	2013 (dalam Triliun Rupiah)
PAJAK		
Pajak Penghasilan Migas	83,46	88,75
PBB Migas	19,79	20,94
BUKAN PAJAK		
Pendapatan Minyak Bumi	144,72	135,33
Pendapatan Gas Alam	61,11	68,30
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	13,06	13,46
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	322,14	326,78
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.338,11	1.438,89
Rasio Penerimaan	24,1 %	22,7 %

Sumber: LKPP 2013

Penerimaan Negara dari Sektor Minerba

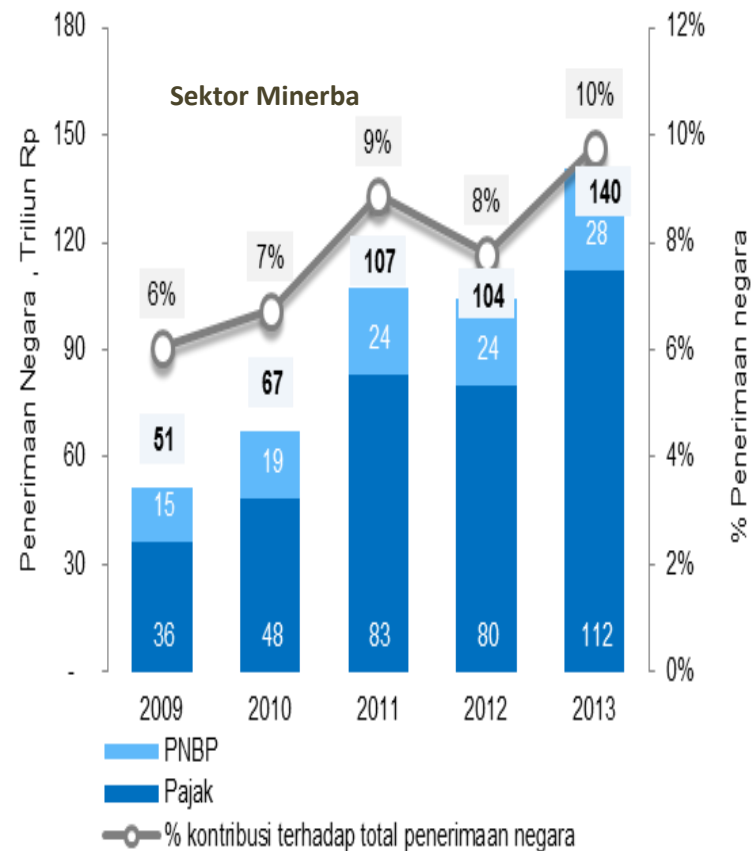
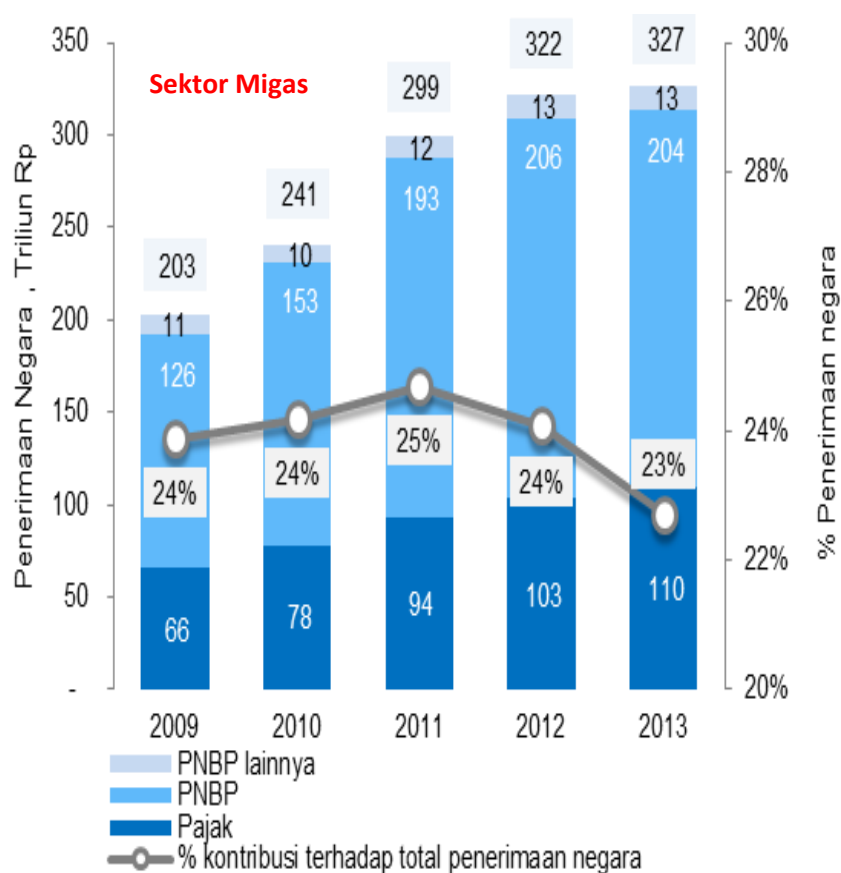
Penerimaan Negara Tahun 2012 dan 2013 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2012 (dalam Triliun Rupiah)	2013 (dalam Triliun Rupiah)
PAJAK	63,10	96,57
BUKAN PAJAK		
Royalti	15,51	18,03
Penjualan Hasil Tambang	8,14	9,79
Iuran tetap	0,36	0,59
Pendapatan perusahaan hutan	0,47	0,59
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	87,58	125,57
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.338,11	1.438,89
Rasio Penerimaan	6,5 %	8,7 %

Sumber: Scoping Study

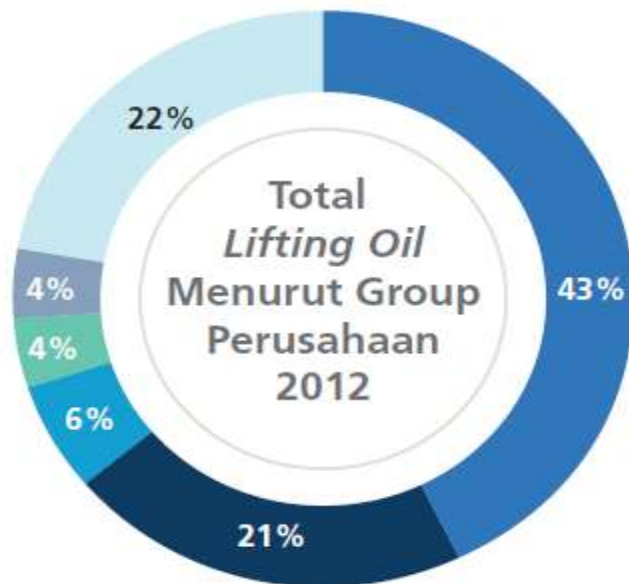
Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

*Sektor Industri Ekstraktif Termasuk Salah Satu
Penyumbang Terbesar Penerimaan Negara*

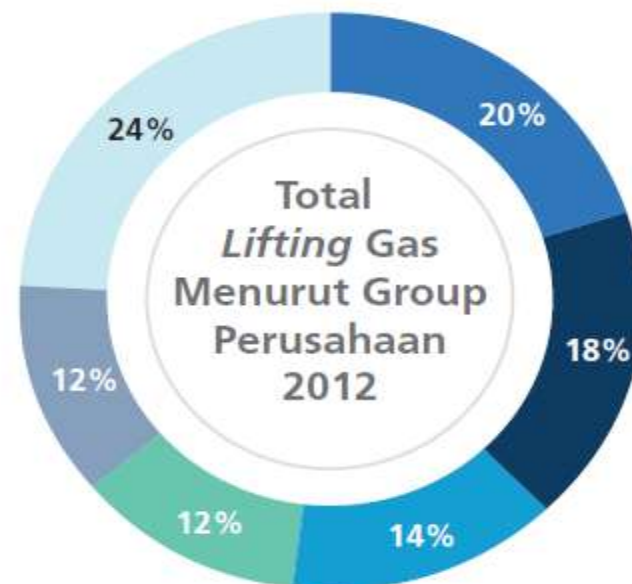


Sekitar **25%** dari Total Penerimaan Negara berasal dari Industri Ekstraktif

Kontribusi Perusahaan Migas Terbesar 2012



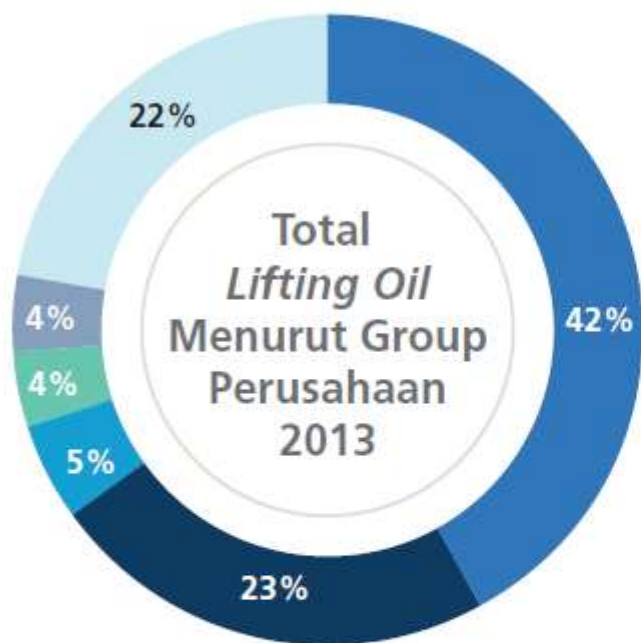
 Chevron	 Inpex
 Pertamina	 Total E&P
 ConocoPhillips	 Lainnya



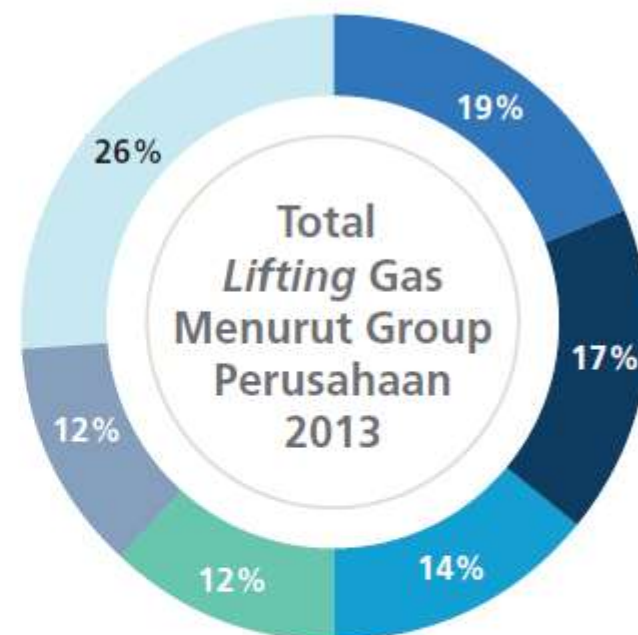
 ConocoPhillips	 Inpex
 Pertamina	 Total E&P
 Beyond Petroleum	 Lainnya

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Kontribusi Perusahaan Migas Terbesar 2013

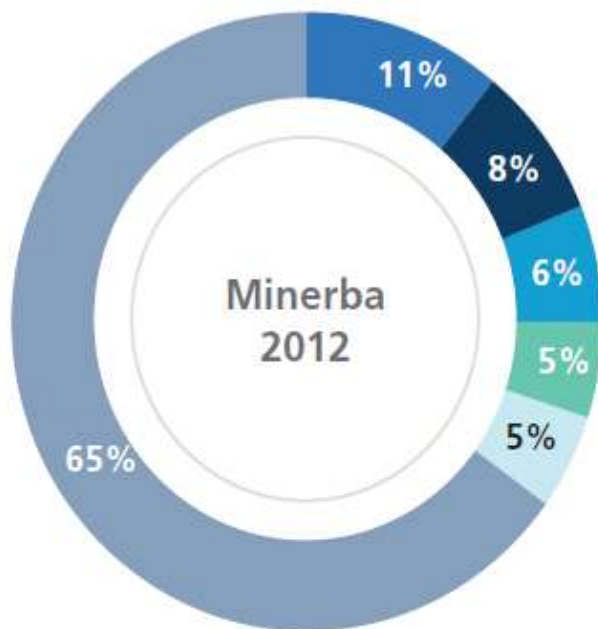


 Chevron	 Inpex
 Pertamina	 Cnooc
 ConocoPhillips	 Lainnya

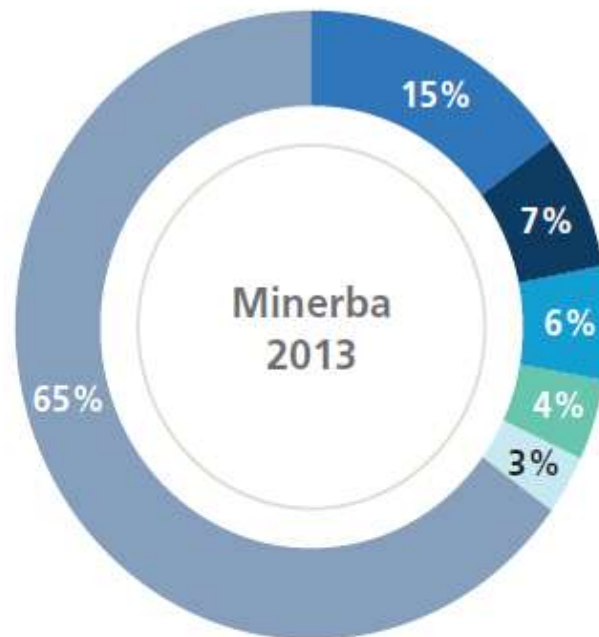


 ConocoPhillips	 Inpex
 Pertamina	 Total E&P
 Beyond Petroleum	 Lainnya

Kontribusi Royalti Perusahaan Minerba Terbesar 2012-2013



- | | |
|-------------------|--------------------|
| Kaltim Prima Coal | Freeport Indonesia |
| Adaro Indonesia | Kideco Jaya Agung |
| Arutmin Indonesia | Lainnya |



- | | |
|--------------------|---------------------------|
| Kaltim Prima Coal | Kideco Jaya Agung |
| Adaro Indonesia | Bukit Asam (Persero) Tbk. |
| Freeport Indonesia | Lainnya |

Sumber: Olahan Data EITI 2012-2013

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2012

Aliran Penerimaan	Satuan	Hasil Rekonsiliasi			%
		KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan (3)=(2)-(1)	
<i>Government Lifting Minyak</i>	Barel	179.733.566	179.733.566	-	-
<i>Government Lifting Gas</i>	mscf	582.930.485	582.930.485	-	-
<i>Domestic Market Obligation</i>	Barel	25.688.134	25.712.827	24.693	0,10
<i>Total Lifting Minyak</i>	Ribuan USD	35.305.658	35.305.658	-	-
<i>Total Lifting Gas</i>	Ribuan USD	27.246.718	27.246.718	-	-
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	Ribuan USD	1.431.736	1.431.520	(216)	0,02
<i>Over/Under Lifting Minyak</i>	Ribuan USD	344.157	352.339	8.182	2,32
<i>Over/Under Lifting Gas</i>	Ribuan USD	130.069	130.384	315	0,24
		Ditjen Migas			
<i>Total Lifting Minyak</i>	Barel	314.302.234	314.305.913	3.679	0,001
<i>Total Lifting Gas</i>	mscf	2.403.191.958	2.389.212.121	(13.979.837)	0,58
<i>Signature Bonus</i>	Ribuan USD	-	-	-	-
		Dit. PNBP			
<i>Corporate & Dividend Tax</i>	Ribuan USD	8.978.931	8.849.495	(129.436)	1,46
<i>Production Bonus</i>	Ribuan USD	3.750	3.750	-	-
		SKK Migas	Dit. PNBP		
<i>Government Lifting Minyak – Ekspor & Domestik</i>	Ribuan USD	20.219.167	20.242.558	23.391	0,12
<i>Government Lifting Gas – Ekspor & Domestik</i>	Ribuan USD	7.633.221	7.633.442	221	0,003

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2013

Aliran Penerimaan	Satuan	Hasil Rekonsiliasi			%
		KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan (3)=(2)-(1)	
<i>Government Lifting Minyak</i>	Barel	161.441.148	161.441.148	-	-
<i>Government Lifting Gas</i>	mscf	599.343.313	599.343.313	-	-
<i>Domestic Market Obligation</i>	Barel	24.620.394	24.620.394	-	-
<i>Total Lifting Minyak</i>	Ribuan USD	31.333.441	31.333.441	-	-
<i>Total Lifting Gas</i>	Ribuan USD	26.246.329	26.246.329	-	-
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	Ribuan USD	1.224.647	1.224.647	-	-
<i>Over/Under Lifting Minyak</i>	Ribuan USD	381.198	381.216	18	0,005
<i>Over/Under Lifting Gas</i>	Ribuan USD	(4.143)	(3.990)	153	3,83
			Ditjen Migas		
<i>Total Lifting Minyak</i>	Barel	298.374.390	298.432.033	57,643	0,02
<i>Total Lifting Gas</i>	mscf	2.406.327.046	2.357.703.962	(48.623.084)	2,06
<i>Signature Bonus</i>	Ribuan USD	200	200	-	-
			Dit. PNBP		
<i>Corporate & Dividend Tax</i>	Ribuan USD	8.048.312	8.034.236	(14.076)	0,17
<i>Production Bonus</i>	Ribuan USD	26.500	26.500	-	-
		SKK Migas	Dit. PNBP		
<i>Government Lifting Minyak – Ekspor & Domestik</i>	Ribuan USD	17.013.989	17.000.881	(13.108)	0,08
<i>Government Lifting Gas – Ekspor & Domestik</i>	Ribuan USD	7.423.089	7.423.089	-	-

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2012

Penerimaan Negara	Mata Uang	Perusahaan Minerba	Instansi Pemerintah	Perbedaan Akhir	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5):(4)
			Ditjen Minerba		
Royalti	Ribuan USD	1.109.030	1.086.664	(22.366)	2,06
PHT	Ribuan USD	847.758	843.026	(4.732)	0,56
			Ditjen Pajak		
PPH Badan	Ribuan USD	2.453.582	2.442.127	(11.455)	0,47
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Ribuan USD	-	-	-	-
			PT KAI		
Fee Transportasi	Ribuan USD	-	-	-	-
Sub Total	Ribuan USD	4.410.370	4.371.817	(38.553)	0,88
			Ditjen Minerba		
Royalti	Jutaan Rupiah	1.577.061	1.607.493	30.432	1,89
PHT	Jutaan Rupiah	279.539	279.539	-	-
			Ditjen Pajak		
PPH Badan	Jutaan Rupiah	5.607.031	5.897.183	290.153	4,92
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Jutaan Rupiah	1.904.971	1.904.971	-	-
			PT KAI		
Fee Transportasi	Jutaan Rupiah	1.822.170	1.822.170	-	-
Sub Total	Jutaan Rupiah	11.190.771	11.511.356	320.585	2,78
Total Ekuivalen	Jutaan Rupiah	53.697.914	53.646.929	(50.985)	0,10

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2013

Penerimaan Negara	Mata Uang	Perusahaan Minerba	Instansi Pemerintah	Perbedaan Akhir	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5):(4)
			Ditjen Minerba		
Royalti	Ribuan USD	1.213.481	1.235.638	22.157	1,79
PHT	Ribuan USD	847.557	857.682	10.125	1,18
			Ditjen Pajak		
PPh Badan	Ribuan USD	1.276.966	1.307.342	30.376	2,32
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Ribuan USD	-	-	-	-
			PT KAI		
Fee Transportasi	Ribuan USD	-	-	-	-
Total USD	Ribuan USD	3.338.005	3.400.663	62.658	1,84
			Ditjen Minerba		
Royalti	Jutaan Rupiah	1.660.580	1.667.313	6.733	0,40
PHT	Jutaan Rupiah	857.743	857.873	130	0,02
			Ditjen Pajak		
PPh Badan	Jutaan Rupiah	4.381.419	4.434.872	53.453	1,21
			Ditjen Anggaran		
Dividen	Jutaan Rupiah	1.511.957	1.511.957	-	-
			PT KAI		
Fee Transportasi	Jutaan Rupiah	1.812.104	1.812.104	-	-
Total Rupiah	Jutaan Rupiah	10.223.803	10.284.119	60.316	0,59
Ekuivalen Rupiah	Jutaan Rupiah	42.395.492	43.059.707	664.216	1,54

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Penerimaan Negara Yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas

Deskripsi	2012	2013
Signature Bonus (ribuan USD)	28.700	15.500
Pajak Bumi dan Bangunan (juta Rp)	14.394.500	15.438.789
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (juta Rp)	46.532	97.816
Pajak Pertambahan Nilai (juta Rp)	6.963.798	9.385.488
CSR (dalam ribuan USD) :		
1. Hubungan Masyarakat	3.267	4.538
2. Pemberdayaan Masyarakat	1.680	1.553
3. Pelayanan Masyarakat	397	253
4. Infrastruktur	1.994	2.091
5. Lingkungan	252	385

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Penerimaan Negara Yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Minerba

dalam jutaan Rupiah dan ribuan USD

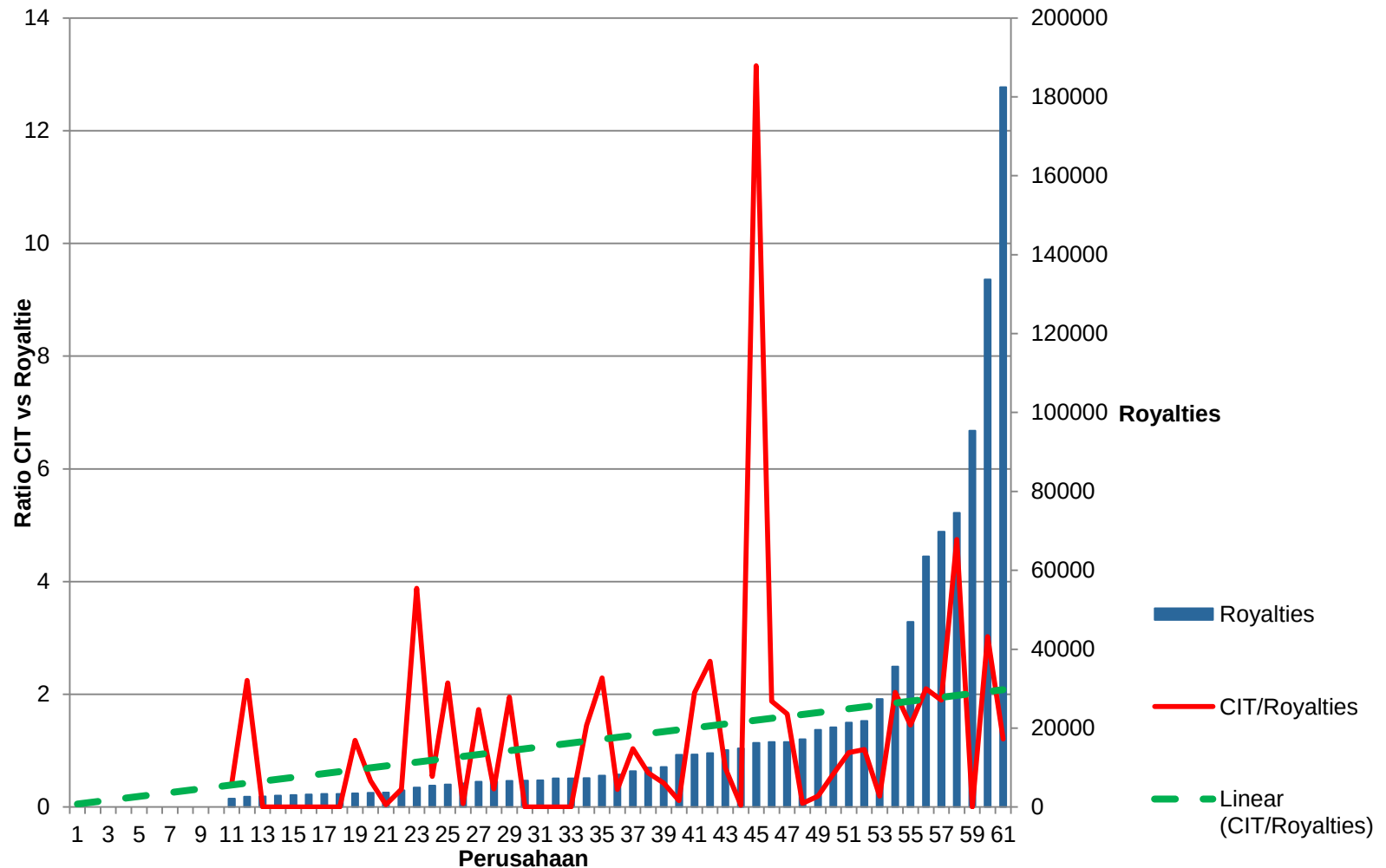
Item Pelaporan	2012			2013		
	Rupiah	USD	Ton	Rupiah	USD	Ton
Iuran Tetap	20.307	5.039	-	21.116	5.816	-
Pajak Bumi dan Bangunan	359.790	-	-	380.692	-	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	608.766	48.334	-	634.676	46.480	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	600.486	4.803	-	413.797	4.830	-
CSR:			-			-
1. Hubungan masyarakat	101.134	3.660		76.797	3.158	
2. Pemberdayaan masyarakat	240.448	134.831		162.815	105.129	
3. Pelayanan masyarakat	12.182	3.180		11.169	4.874	
4. Infrastruktur	83.014	14.077		126.182	9.598	
5. Lingkungan	2.728	193		3.504	184	
Penyediaan Infrastruktur	3.584	1.526	-	3.411	2.061	-
Iuran Penggunaan Kawasan Hutan	350.150	3	-	368.963	-	-
DMO	-	-	44.398.363	-	-	53.448.032

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

[illegible]

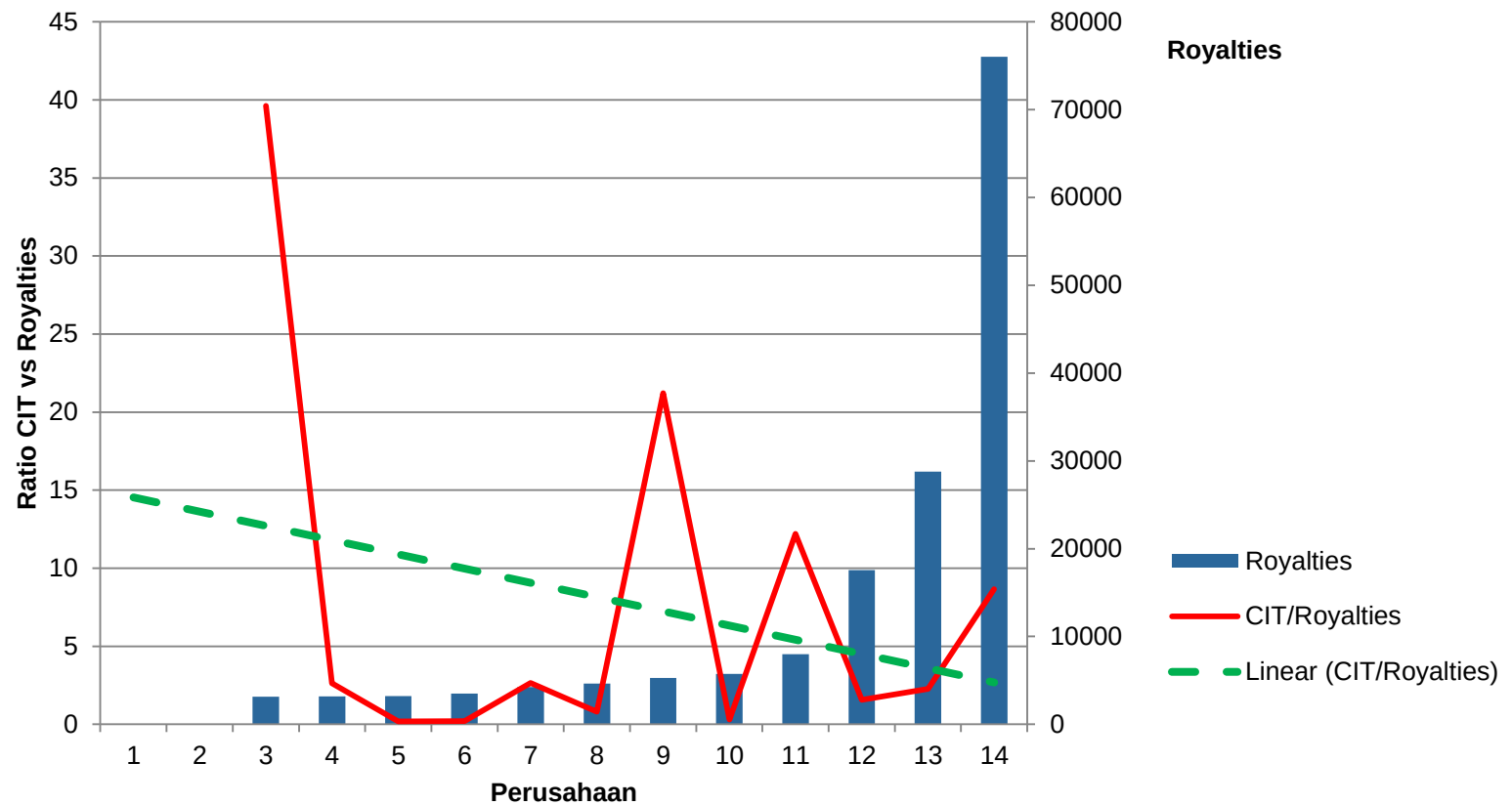
Profil Penerimaan Negara dari Perusahaan Batubara 2012

Penerimaan dari Perusahaan Batubara 2012



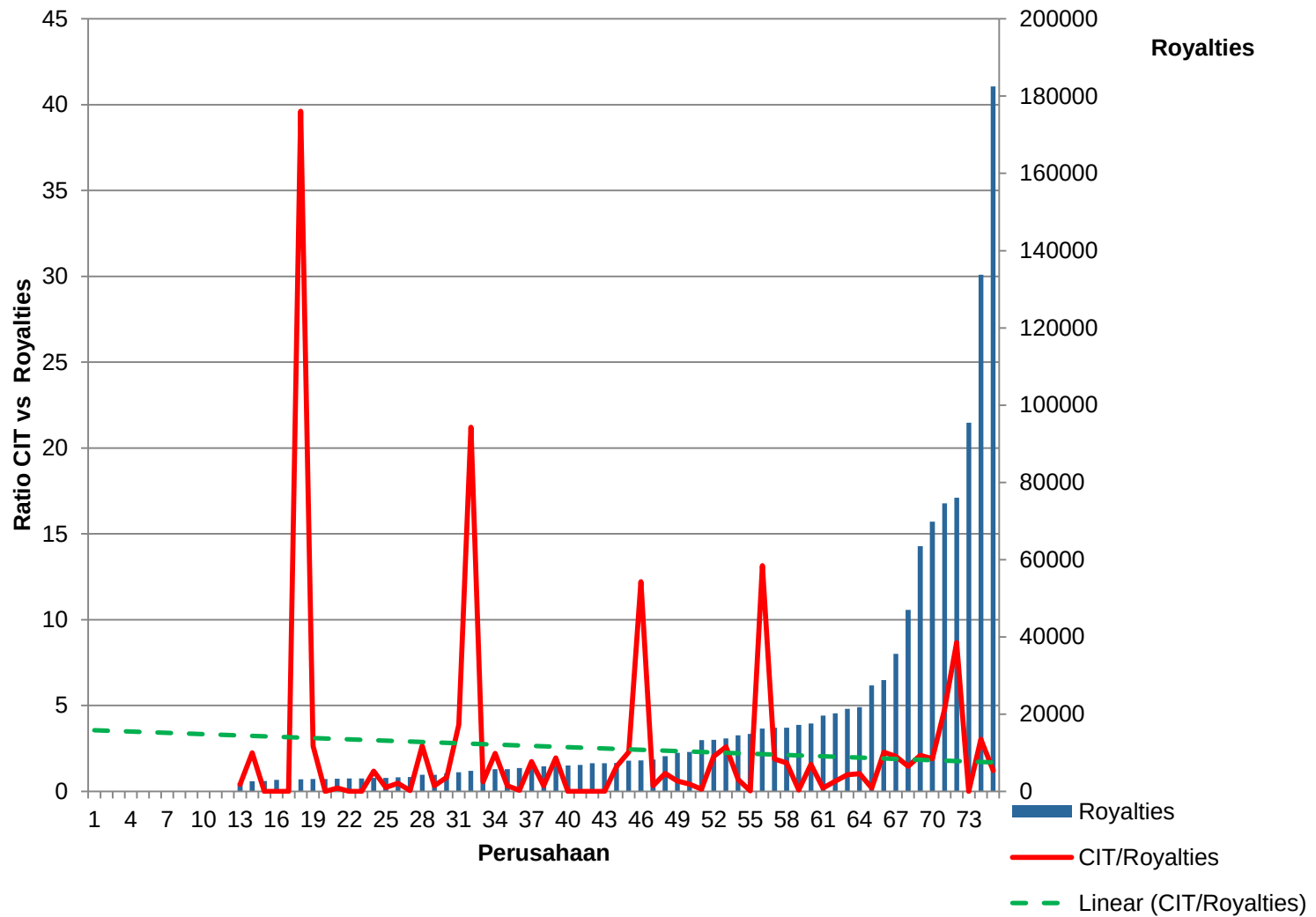
Profil Penerimaan dari Perusahaan Mineral 2012

Penerimaan dari Perusahaan Mineral 2012



Profil Penerimaan dari Perusahaan Minerba 2012

Penerimaan dari Perusahaan Minerba 2012

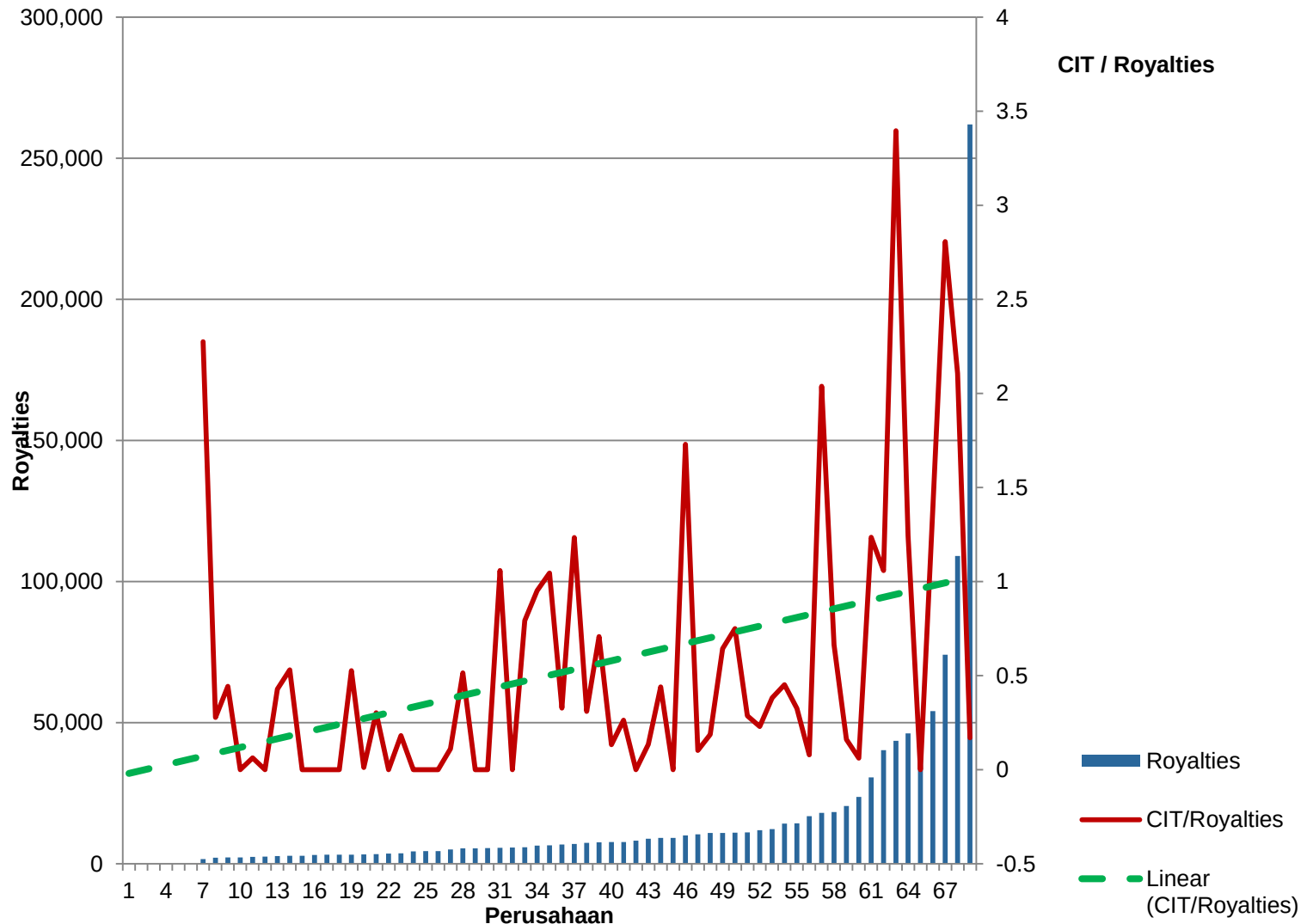




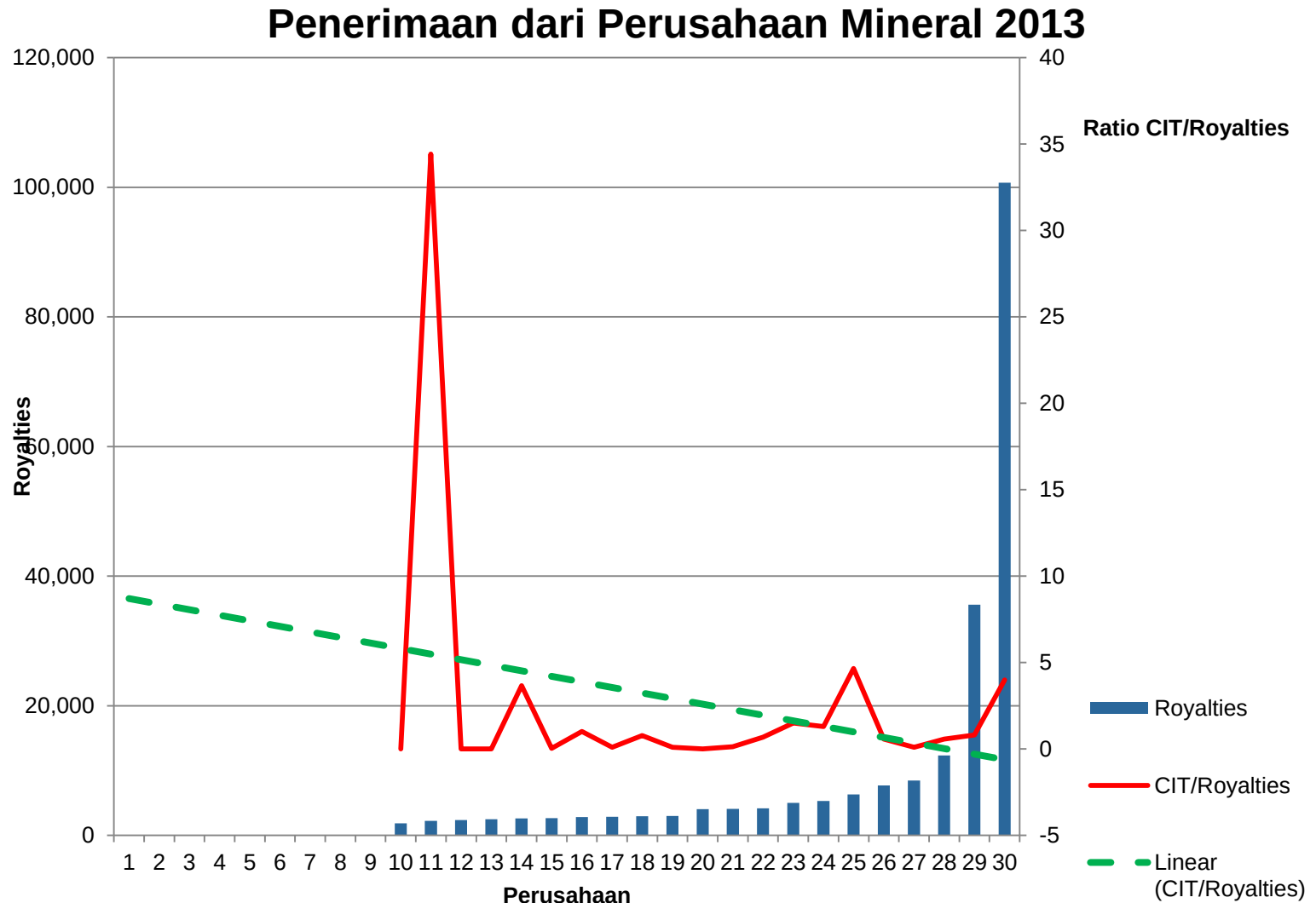
Profil Perusahaan Minerba 2013

Profil Penerimaan Negara dari Perusahaan Batubara 2013

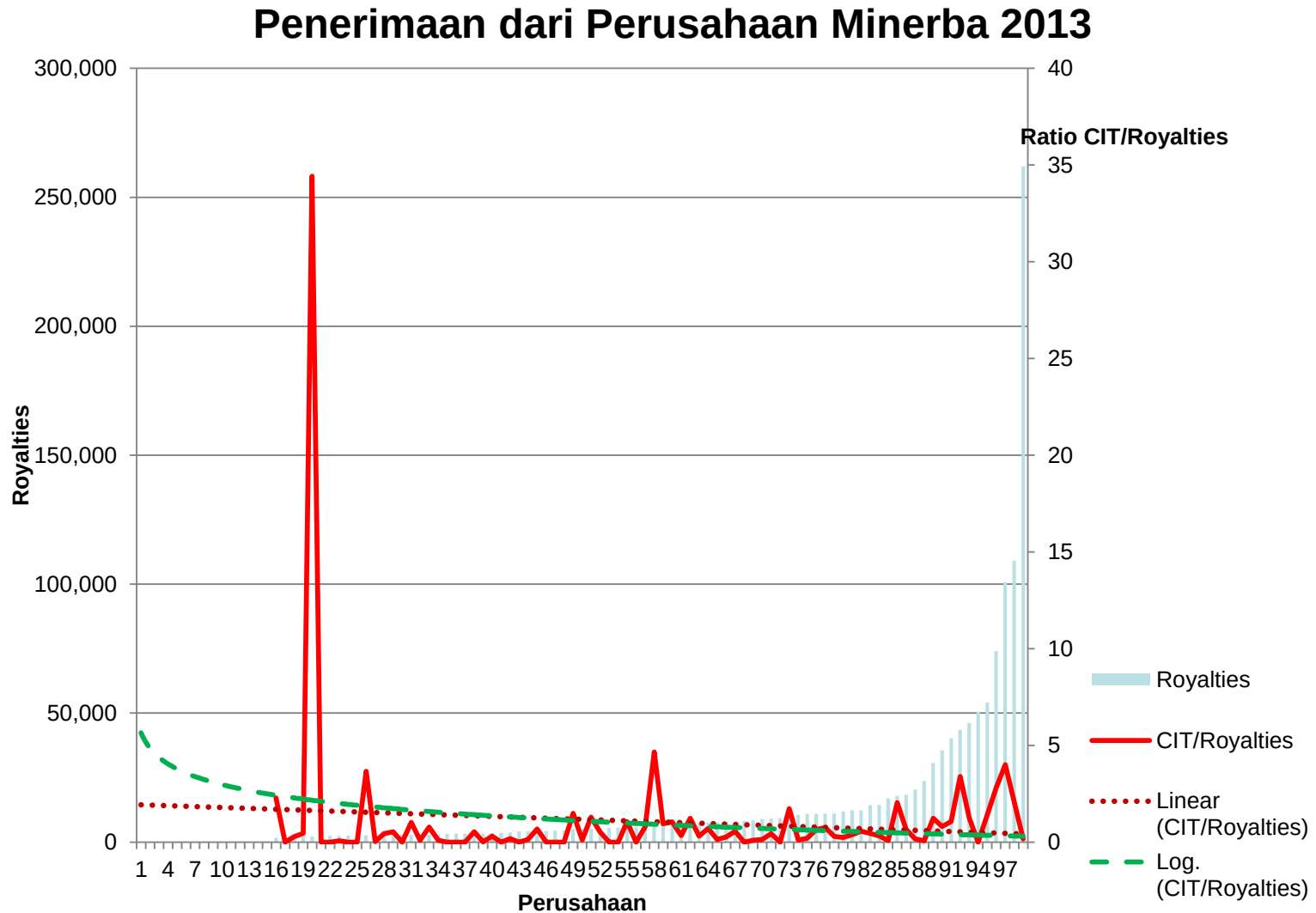
Penerimaan Negara dari Perusahaan Batubara 2013



Profil Penerimaan Negara dari Perusahaan Mineral 2013



Profil Penerimaan Negara dari Perusahaan Minerba 2013



Rekomendasi (1)

- Mendorong dilakukannya transparansi informasi kunci sesuai dengan ketentuan dalam standar EITI
- Merekomendasikan agar Tim Pelaksana dapat mendefinisikan “pemilik manfaat” untuk digunakan pada laporan yang akan datang
- Menyarankan agar Tim Pelaksana bisa lebih terlibat dan berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi, memberikan penjelasan yang komprehensif dan mengkonfirmasi bagian-bagian yang terdapat di laporan EITI.
- Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Kemendagri dan pihak-pihak yang memiliki inisiatif sejenis seperti Korsup minerba KPK
- Mendorong penerbitan peraturan teknis yang mengatur kewajiban pelaporan entitas perusahaan minerba kepada Pemerintah Daerah kemudian pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat

Rekomendasi (2)

- Untuk kelancaran laporan rekonsiliasi tahun tahun mendatang, Ketua Tim Pengarah dapat meminta kepada Menteri Keuangan untuk memberikan izin tertulis kepada Dirjen Pajak untuk pembukaan data PPh Badan entitas perusahaan pelapor untuk kepentingan Pelaporan EITI
- Untuk pembuatan *Scoping Study* mendatang perlu dicantumkan batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri, misalnya 5% sesuai dengan ketentuan pengungkapan laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- *Scoping Study* perlu menetapkan tingkat rincian dan kelengkapan data yang perlu dipenuhi dalam Laporan EITI.
- Sosialisasi penyeteroran PNPB kepada Waba dan Pemerintah Daerah.
- Penerapan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi sehingga tidak ada lagi perbedaan pencatatan antara SAU-dan SAI



LAMPIRAN

Aliran Penerimaan	Sebelum Rekonsiliasi (nilai dalam Ribuan USD & Jutaan Rupiah)								Sesudah Rekonsiliasi (nilai dalam Ribuan USD & Jutaan Rupiah)							
	Entitas Pelapor		Minerba, DJP		Perbedaan Awal				Entitas Pelapor		Minerba, DJP		Perbedaan Akhir			
	(1)		(2)		(3)=(2)-(1)				(4)		(5)		(6)=(5)-(4)			
	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ket.	USD	Ket.	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ket.	USD	Ket.
Royalti	-	182,494	-	174,994	-		(7,500)	A	-	182,494	-	174,994	-		(7,500)	A
Penjualan Hasil Tambang	-	108,918	-	103,918	-		(5,000)	A	-	108,918	-	103,918	-		(5,000)	A
PPh Badan	367,088	163,405	400,367	178,975	33,279	1	15,570	1	400,367	178,975	400,367	178,975	-		-	
Total	367,088	454,818	400,367	457,887	33,279		3,070		-	470,387	400,367	457,887	-		(12,500)	

Keterangan:

1. Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap

Keterangan:

- A. Timing difference (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun, sedangkan Minerba mencatat penerimaan pada tahun berikutnya)

Tabel 2 - Yang Tidak Direkonsiliasi

Aliran Penerimaan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Ton
Iuran Tetap	-	91	-
PBB	460	-	-
PDRD	-	207	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	-	-	-
Biaya Sosial (CSR)	-	4,728	-
Penyediaan Infrastruktur	-	-	-
PNBP Kawasan Hutan	-	-	-
DMO Batubara	-	-	6,969,918
Total	460	5,026	6,969,918

Aliran Penerimaan	Sebelum Rekonsiliasi (nilai dalam Ribuan USD & Jutaan Rupiah)								Sesudah Rekonsiliasi (nilai dalam Ribuan USD & Jutaan Rupiah)							
	Entitas Pelapor		Minerba, DJP		Perbedaan Awal				Entitas Pelapor		Minerba, DJP		Perbedaan Akhir			
	(1)		(2)		(3)=(2)-(1)				(4)		(5)		(6)=(5)-(4)			
	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ket.	USD	Ket.	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ket.	USD	Ket.
Royalti	-	261,979	-	269,479	-		7,500	A	-	261,979	-	269,479	-		7,500	A
Penjualan Hasil Tambang	-	162,886	-	167,886	-		5,000	A	-	162,886	-	167,886	-		5,000	A
PPh Badan	291,132	22,433	291,132	22,752	-		319	1	291,132	22,752	291,132	22,752	-		-	
Total	291,132	447,298	291,132	460,117	-		12,819		-	447,617	291,132	460,117	-		12,500	

Keterangan:

1. Pengisian formulir awal tidak lengkap

Keterangan:

- A. Timing difference (Perusahaan melapokan pada akhir tahun sebelumnya, sedangkan minerba mencatat pada tahun ini)

Tabel 2 - Yang Tidak Direkonsiliasi

Aliran Penerimaan	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Ton
Iuran Tetap	-	91	-
PBB	498	-	-
PDRD	-	221	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	-	-	-
Biaya Sosial (CSR)	-	5,026	-
Penyediaan Infrastruktur	-	-	-
PNBP Kawasan Hutan	-	-	-
DMO Batubara	-	-	6,536,499
Total	498	5,338	6,536,499

Aliran Penerimaan	Sebelum Rekonsiliasi (nilai dalam Ribuan USD & Jutaan Rupiah)								Setelah Rekonsiliasi (nilai dalam Ribuan USD & Jutaan Rupiah)							
	Entitas Pelapor		Minerba, DJP		Perbedaan Awal				Entitas Pelapor		Minerba, DJP		Perbedaan Akhir			
	(1)		(2)		(3)=(2)-(1)				(4)		(5)		(6)=(5)-(4)			
	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ket.	USD	Ket.	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ket.	USD	Ket.
Royalti	-	76,003	-	76,003	-		-		-	76,003	-	76,003	-		-	
Dividen	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	
PPH Badan	-	658,742	-	658,742	-		5	A	-	658,742	-	658,742	-		5	A
Total	-	734,745	-	734,750	-		5		-	734,745	-	734,750	-		5	

Keterangan:

Keterangan:

A. Setoran yang ditujukan dalam satu grup perusahaan

Tabel 2 - Yang Tidak Direkonsiliasi

Aliran Penerimaan	Rupiah	USD
Iuran Tetap	-	131
PBB	80,362	-
PDRD	182,259	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	235,692	-
Biaya Sosial (CSR)	-	115,958
Penyediaan Infrastruktur	-	-
PNBP Kawasan Hutan	-	-
Total	498,313	116,089

Aliran Penerimaan	Sebelum Rekonsiliasi (nilai dalam Ribuan USD & Jutaan Rupiah)								Setelah Rekonsiliasi (nilai dalam Ribuan USD & Jutaan Rupiah)							
	Entitas Pelapor		Minerba, DJP, DJA		Perbedaan Awal				Entitas Pelapor		Minerba, DJP, DJA		Perbedaan Akhir			
	(1)		(2)		(3)=(2)-(1)				(4)		(5)		(6)=(5)-(4)			
	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ket.	USD	Ket.	Rupiah	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Ket.	USD	Ket.
Royalti	-	100,718	-	100,718	-		-		-	100,718	-	100,718	-		-	
Dividen	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		-	
PPH Badan	767,729	345,326	-	345,338	(767,729)	1	12	B	767,729	345,326	767,729	345,338	-		12	A
Total	767,729	446,044	-	446,056	(767,729)		12		-	446,044	767,729	446,056	-		12	

Keterangan:

1. Perusahaan melaporkan pemindahbukuan dimana didalamnya termasuk pajak yang dibayarkan sebelum tahun 2013

Keterangan:

A. Setoran yang ditujukan dalam satu grup perusahaan

Tabel 2 - Yang Tidak Direkonsiliasi

Aliran Penerimaan	Rupiah	USD
Iuran Tetap	-	131
PBB	69,624	-
PDRD	62,932	-
Pembayaran Langsung ke Pemda	35,166	-
Biaya Sosial (CSR)	-	90,425
Penyediaan Infrastruktur	-	-
PNBP Kawasan Hutan	-	-
Total	167,722	90,557